



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 – 2023

**EVALUASI PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1444 H/ 2023 M
DI EMBARKASI SURABAYA**

3 – 5 JULI 2023



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	4
BAB III	TEMUAN DAN REKOMENDASI	6
BAB IV	PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik, pada Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengenai pemberangkatan jemaah haji tahun 1444 H/2023 M di embarkasi Surabaya.
- b. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, utamanya yang terkait dengan pemberangkatan jemaah haji tahun 144 H/2023 M.

2. TUJUAN

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pemberangkatan jemaah haji tahun 1444 H/2023 M.

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka evaluasi pemberangkatan jemaah haji Tahun 1444 H/2023 M dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan peninjauan.

A. Pertemuan

Komisi VIII DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat yang bertempat di UPT Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VIII DPR RI mendapat penjelasan mengenai pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya pada tahun 1444 H/2023 M, antara lain sebagai berikut:

1. Secara umum pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya pada tahun 1444 H/2023 M berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang direncanakan. Jemaah yang diberangkatkan sebanyak 38.360 ribu Jemaah. Walau demikian, terdapat beberapa kendala di lapangan, namun tidak mengganggu kelancaran pemberangkatan jemaah haji.
2. Untuk menghindari adanya kursi kosong selama pemberangkatan jemaah haji tahun 1444 H/2023 M, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menggunakan strategi daerah penyangga, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, dan lainnya yang dekat dengan Surabaya. Daerah penyangga ini harus mempersiapkan jemaahnya apabila sewaktu-waktu dipanggil untuk mengisi kursi kosong karena berbagai alasan. Strategi ini mampu menekan kursi kosong selama pemberangkatan jemaah haji tahun 1444 H/2023 M seminimal mungkin.

3. Terdapat 3 jemaah haji dari Embarkasi Surabaya yang dideportasi ketika sampai di Arab Saudi, karena masih masuk dalam daftar cekal Pemerintah Arab Saudi, walau sudah mendapat visa haji.
4. Untuk menafikan jemaah haji yang dideportasi ketika telah sampai di Arab Saudi, maka pada penyelenggaraan ibadah haji tahun yang akan datang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengusulkan agar di Embarkasi Jawa Timur juga diberlakukan *fast track*, seperti yang di Embarkasi Pondok Gede, Provinsi DKI Jakarta dan Embarkasi Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dengan pemberlakuan *fast track*, maka pemeriksaan semua administrasi jemaah haji dapat diselesaikan sebelum jemaah berangkat ke Arab Saudi.

B. Peninjauan

Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerjasa spesifik ke Provinsi Jawa Timur juga melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di UPT Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Secara umum, sarana prasarana yang tersedia di UPT Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, baik, namun aula yang terletak di belakang ruang tamu VIP membutuhkan renovasi, karena sempit. Ketika aula tersebut digunakan untuk pemberangkatan jemaah haji kurang layak. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI perlu membenahi aula dimaksud. Selain itu, dengan jumlah jemaah haji yang sudah 100 % maka Asrama haji kekurangan kamar yang representatif dan harus ada solusi untuk dibantu anggaran SBSN untuk pembangunan ruang penginapan dengan kapasitas 1500 orang.

BAB III

TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. Temuan

1. Manajemen keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya pada tahun 1444 H/2023 M berjalan dengan baik.
2. Pemberlakuan *fast track* pada keberangkatan jemaah haji tahun 1445 H/2024 M di Embarkasi Surabaya mendesak, sehingga kejadian jemaah haji dideportasi ketika sudah sampai di Arab Saudi tidak terulang kembali.
3. Pemberlakuan daerah penyangga untuk meminimalisir kursi kosong pada saat keberangkatan jemaah haji merupakan praktik baik yang dapat diteruskan.
4. UPT Asrama Haji Surabaya membutuhkan renovasi, sehingga dapat menopang penyelenggaraan layanan yang maksimal kepada jemaah haji. Hal ini harus mendapat perhatian dari Kementerian Agama RI.

B. Rekomendasi

1. Kementerian Agama RI harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Arab Saudi agar di Embarkasi Surabaya pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M juga diberlakukan *fast track*.
2. Kementerian Agama RI seyogyanya menggunakan strategi daerah penyangga untuk meminimalisir kursi kosong pada saat keberangkatan jemaah haji yang akan datang, seperti yang dipraktikkan di Embarkasi Surabaya.
3. Kementerian Agama RI harus memenuhi kebutuhan penambahan kamar dan renovasi aula penerimaan dan keberangkatan Jemaah haji di Embarkasi Surabaya, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan layanan yang maksimal kepada Jemaah haji.

BAB IV

PENUTUP

Demikian bahan laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Harapannya laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kunjungan kerja, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.